

ANALISIS PRIORITAS ALTERNATIF KEBIJAKAN PROGRAM FOOD ESTATE KALIMANTAN TENGAH DENGAN METODE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP)

Bimo Johan Baskara¹; Elsa Sabrina²; Ridha Dinaningtyas³ Khanza Ananda Rohman⁴
Prodi S1 Administrasi Publik Kampus Rembang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Diponegoro Semarang

[1bimojohan@students.undip.ac.id](mailto:bimojohan@students.undip.ac.id); [2elsasbrna@students.undip.ac.id](mailto:elsasbrna@students.undip.ac.id);
[3ridhadinaningtyas@students.undip.ac.id](mailto:ridhadinaningtyas@students.undip.ac.id); khanzaanandarohman@students.undip.ac.id

ABSTRAK

Proyek food estate sudah berjalan empat tahun lamanya, beranjak dari himbauan Food and agriculture (FAO) yang menyatakan potensi Krisis pangan akibat kebijakan karantina yang mempengaruhi rantai pasokan pangan dunia. Pemerintah Indonesia menyambut himbauan tersebut dengan program food estate dalih untuk menjaga kebutuhan stok pangan nasional. empat tahun semenjak Peraturan Presiden No. 109/2020 tentang Proyek Strategis Nasional (PSN), program food estate belum menunjukkan hasil yang signifikan. Locus Penelitian ini difokuskan pada proyek food estate di Kalimantan Tengah, menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menilai alternatif kebijakan yang sesuai dengan kriteria Technical Feasibility, Economic and Financial, Political Viability, dan Administrative Operability. Hasil analisis menunjukkan bahwa alternatif kebijakan terbaik adalah menambah ragam jenis pangan, yang memenuhi semua kriteria dengan hasil akhir 36%. Alternatif ini diikuti oleh evaluasi revisi perizinan, melibatkan masyarakat dalam merumuskan kebijakan, memfokuskan anggaran pada petani, dan konsisten dalam program reforma agraria dan perhutanan sosial, Penelitian menunjukkan pentingnya diversifikasi pangan.

Kata Kunci: Pangan, PSN, Food Estate, Kalimantan Tengah

PRIORITY ANALYSIS OF CENTRAL KALIMANTAN FOOD ESTATE PROGRAM POLICY ALTERNATIVES USING THE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) METHOD

ABSTRACT

The food estate project has been running for four years, based on an appeal by Food and Agriculture (FAO) which stated the potential for a food crisis due to quarantine policies that affected the world food supply chain. The Indonesian government welcomed this appeal with a food estate program under the pretext of maintaining national food stock needs. four years since Presidential Regulation no. 109/2020 concerning National Strategic Projects (PSN), the food estate program has not shown significant results. Locus This research focuses on food estate projects in Central Kalimantan, using the Analytical Hierarchy Process (AHP) to assess policy alternatives that are in accordance with the criteria of Technical Feasibility, Economic and Financial, Political Viability, and Administrative Operability. The results of the analysis show that the best policy alternative is to increase the variety of food types, which meets all the criteria with a final result of 36%. This alternative is followed by evaluating licensing revisions, involving the community in formulating policies, focusing the budget on farmers, and being consistent in agrarian reform and social forestry programs. Research shows the importance of food diversification.

Keywords: Food, PSN, Food Estate, Central Kalimantan

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 tahun 2019 menghentikan aktivitas manusia, mengganggu kehidupan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Badan Pangan Dunia (FAO) khawatir akan terjadi krisis pangan di tengah pandemi. Peringatan ini mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan dengan mengeluarkan kebijakan pangan untuk mencegah krisis pangan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Proyek food estate, yang mendapatkan dukungan dari presiden dan pemerintah, dilaksanakan di empat wilayah: Kalimantan Tengah, Papua, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.

Rapat terbatas (RATAS) yang dipimpin Presiden Jokowi pada Juni 2020 membahas Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional dan Pembangunan Kawasan Industri. kemudian pada bulan Juli 2020 Jokowi berniat untuk memperkuat stok pangan nasional dari hulu ke hilir dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR. Pengembangan lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional kemudian menempatkan proyek ini sebagai prioritas kedua dalam Program Strategis Nasional (PSN) 2020–2024. Dengan menetapkan wilayahnya sebagai lumbung pangan nasional, Kalimantan Tengah menjadi bagian penting dari proyek ini. Kawasan seluas 770.601 hektar yang sebelumnya merupakan kawasan PLG di dua kabupaten, Pulang Pisau dan Kapuas, ditetapkan untuk pengembangan food estate.

Krisis pangan secara keseluruhan bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah manusia. Namun, krisis ini tidak dapat dilepaskan dari politik pangan global yang menempatkan pangan sebagai komoditas, yang mengarah pada industrialisasi pangan. Pertarungan antara kepentingan pangan dan energi ini berkembang menjadi tantangan global di tengah ancaman krisis iklim, dan menjadi dasar argumen berikutnya untuk mendorong liberalisasi pangan yang mengendalikan komoditas.

Hak atas makanan tidak dianggap sebagai hak yang sama untuk semua warga negara. Selain itu, proyek food estate tidak merupakan inovasi kebijakan pangan yang baru; ada banyak nama dan alasan untuk hal ini. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya telah mengusulkan proyek MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) di Merauke, Papua, karena krisis energi dan perubahan iklim.

Selain itu, ada juga proyek lahan pangan lainnya, seperti proyek seluas 300.000 hektar di Bulungan, Kalimantan Utara, dan proyek seluas 100.000 hektar di Ketapang, Kalimantan Barat. Proyek food estate ini bukan hanya untuk mengatasi krisis pangan yang diantisipasi, tetapi juga harus dilihat dari berbagai sudut pandang dan elemen yang terlibat dalam proyek besar yang dibuat oleh pemerintah pusat. Salah satunya adalah bagaimana kebijakan pangan berhubungan dengan kebijakan agraria yang telah diterapkan oleh rezim pemerintahan sebelumnya, serta menekankan pada kebijakan ekonomi dan politik.

Keberagaman masalah pada program food estate harus diselesaikan berdasar urgensitas permasalahan yang terjadi, metode Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah sebuah metode yang tepat digunakan ketika kita berbicara urgensitas kebijakan. Ahm yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970-an oleh Thomas L. Saaty, seorang ahli matematika dari universitas Pittsburgh Amerika, Metode ini, yang pada dasarnya merupakan proses sistematis yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, memiliki kemampuan untuk menghasilkan nilai numerik dan menggambarkan elemen masalah secara hirarki. Terdapat beberapa penelitian terkait Program food estate yang menggunakan metode AHM tapi belum ditemukan yang menggunakan pendekatan multi kriteria; Technical Feasibility, Economic and Financial, Political Viability, Administrative Operability. Proses Analytical Hierarchy Process (AHP) bergantung pada imajinasi, pengalaman, pengetahuan, logika, dan intuisi untuk menyusun hirarki masalah. Di sisi lain, aspek kualitatif dari metode ini digunakan untuk mendefinisikan masalah dan hierarkinya, sedangkan aspek kuantitatif digunakan untuk mengkomunikasikan penilaian dan preferensi.

METODE

Penelitian dilakukan menggunakan metode Studi pustaka, Studi pustaka adalah cara mengumpulkan data dan informasi dengan menelaah teori, konsep, pendapat serta argumen-argumentasi

yang terutang dalam media cetak, terutama bacaan memiliki relevansi dengan problematika yang diangkat dalam penelitian (Sarwono, 2010 : 34-35).



Gambar. 1

Pengolahan data diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh, yang kemudian diinterpretasikan menghasilkan sebuah gambaran untuk kesimpulan (Darmalaksana, 2020). Kemudian untuk meninjau alternatif kebijakan atas Perpres 109/2020 tentang Mendorong Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam hal ini food estate, kami menggunakan 4 kriteria kebijakan Publik terhadap suatu alternatif yakni; Technical Feasibility, Economic and Financial, Political Viability, Administrative Operability.

Dijelaskannya oleh Patton dan Sawicki, 1986:156-167 bahwasanya;

1. Technical Feasibility, Evaluasi Teknis adalah suatu metode analitis yang bertujuan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan

kebijakan atau program dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam domain ini, dua prinsip penilaian yang mencakup aspek efektivitas dan kecukupan dianggap sebagai parameter utama yang signifikan.

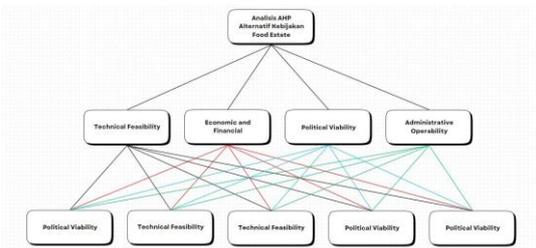
2. **Economic and Financial possibility**, Menilai seberapa besar pengeluaran yang terjadi dalam pelaksanaan suatu program, sejalan dengan hasil yang berhasil dicapai, menjadi fokus dari evaluasi ekonomi. Dalam konteks ini, sebuah analogi yang menonjol adalah konsep pohon yang digunakan untuk merangkum kriteria evaluasi ekonomi, dengan perbedaan yang jelas antara elemen yang dapat diukur secara moneter dan yang tidak dapat diukur. Terdapat juga perbedaan esensial dalam mempertimbangkan aspek langsung dan tidak langsung dari hubungan antara biaya dan manfaat yang terkait dengan keberlanjutan program.
3. **Political Viability**, Kebijakan yang disusun dalam konteks uji politik harus diarahkan menuju evaluasi yang mempertimbangkan kriteria politik secara cermat. Evaluasi tersebut berfokus pada akseptabilitas berbagai alternatif kebijakan di kalangan para pemangku kepentingan, termasuk pejabat publik, warga negara yang berpengaruh, kelompok-kelompok kepentingan, serta

sumber-sumber kekuasaan lainnya. Aspek hukum, peraturan, dan regulasi menjadi titik sentral dalam upaya menentukan alternatif kebijakan yang dapat diterima sebagai hasil dari proses politik. Kriteria politik yang meliputi kelayakan, akseptabilitas, responsivitas, kepatuhan hukum, dan keadilan menjadi faktor yang tak terhindarkan dalam setiap analisis kebijakan yang holistik.

4. **Administrative Operability**, Menilai tingkat keterlaksanaan yang realistis dari kebijakan atau program yang direncanakan dalam konteks politik, sosial, dan administratif menjadi suatu tugas yang krusial. Dalam proses evaluasi operasional administratif, beberapa kriteria yang memerlukan pertimbangan meliputi ruang lingkup wewenang, kemampuan untuk mempertahankan komitmen institusional, dan dukungan yang diperoleh dari berbagai entitas organisasional.

Langkah selanjutnya setelah menentukan kriteria adalah penentuan urutan prioritas penanganan jalan dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Metode ini diawali dengan penyusunan hirarki yaitu dengan penentuan kriteria, Selanjutnya dilakukan analisis pembobotan untuk menentukan skala prioritas alternatif kebijakan. Hasil skala prioritas alternatif kebijakan food estate yang diperoleh dari hasil analisa metode AHP. Adapun

langkah-langkah penelitian ini diperlihatkan pada Diagram Alir Penelitian pada Gambar berikut.



Gambar. 2

Alternatif kebijakan yang diajukan adalah:

1. Evaluasi revisi kebijakan;
2. Memfokuskan anggaran pada petani;
3. Menambah ragam jenis pangan;
4. Melibatkan masyarakat dalam merumuskan kebijakan; dan
5. Konsisten dalam program reforma agraria dan perhutanan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis AHP menunjukkan Alternatif kebijakan Ke-3; mengakhiri ketergantungan terhadap satu atau dua komoditas pangan dan mulai memperkuat sumber pangan lain yang lebih beragam, dengan menempatkan hal yang paling mendasar bahwa pangan adalah hak asasi. Adalah rekomendasi yang paling unggul berdasarkan 4 kriteria yang digunakan dalam metode analisis AHP.

Alternatif kebijakan yang memenuhi kriteria **Technical Feasibility** diantara kelima alternatif kebijakan tersebut adalah menambah ragam jenis pangan; melibatkan masyarakat dalam merumuskan kebijakan; dan konsisten dalam program reforma agraria dan

perhutanan sosial dengan skor 0,304 dan disusul dengan alternatif; evaluasi revisi perizinan; dan memfokuskan anggaran pada petani dengan skor 0.043.

Selanjutnya alternatif yang memenuhi kriteria **Economic and Finance** adalah; evaluasi dan revisi; konsisten dalam program reforma agraria dan perhutanan sosial dengan skor 0.304 dan ikuti dengan alternatif; memfokuskan anggaran pada petani; menambah ragam jenis pangan; melibatkan masyarakat dalam merumuskan kebijakan dengan skor 0.043.

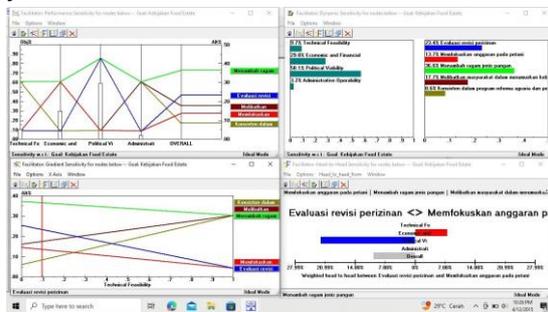
Kemudian kriteria **Political Viability** dengan nilai alternatif paling signifikan adalah; Evaluasi revisi perizinan; dan menambah ragam jenis pangan dengan skor 0.429 dan memfokuskan Anggaran pada petani; melibatkan masyarakat dalam merumuskan kebijakan; dan konsisten dalam program reforma agraria dan perhutanan sosial memperoleh skor 0.048.

Terakhir pendekatan **Administrative Operability** memukakan skor sebesar 0.304 untuk; menambah ragam jenis pangan; melibatkan masyarakat dalam merumuskan kebijakan; dan konsisten dalam program reforma agraria dan perhutanan sosial memperoleh skor kemudian alternatif Evaluasi revisi perizinan; dan memfokuskan Anggaran pada petani memperoleh skor sebesar 0.043.

Kriteria alternatif kebijakan pun ditentukan berdasarkan persentase *possibility to achieve* (semakin besar persentase, semakin besar kemungkinan untuk tidak tercapai) dengan perolehan:

1. Political viability: 58.1%
2. Economic and Finance: 29%
3. Technical Feasibility: 9,7%
4. Administrative Operability: 3,2%

Yang artinya untuk memenuhi kriteria political Viability lebih sulit dibandingkan 3 kriteria lainnya yang memperoleh persentase jauh lebih kecil. Sebagaimana hasil AHP menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang terbaik (memenuhi kriteria) akan memperoleh nilai terbesar dalam bentuk persentase, yaitu:



Gambar. 3

1. **Menambah ragam jenis pangan** memenuhi seluruh kriteria dengan peroleh hasil akhir: 36%
2. **Evaluasi revisi perizinan** memenuhi 2 kriteria: Political Viability dan Administrative Operability. Dengan hasil akhir: 23.4%
3. **Melibatkan masyarakat dalam merumuskan kebijakan** memenuhi 2 kriteria: Economic and Finance dan Administrative Operability. Dengan hasil akhir: 17.7%
4. **Memfokuskan Anggaran pada petani** memenuhi 2 kriteria: Economic and Finance dan

Administrative Operability. Dengan hasil akhir: 13.7%

5. **Konsisten dalam program reforma agraria dan perhutanan sosial** dapat memenuhi 2 kriteria: Technical feasibility dan Administrative Operability. Dengan hasil akhir: 8.6 %

Apa itu **menambah ragam jenis pangan?**

Menambah ragam pangan dapat dimaknai sebagai disparitas tumbuhan yang ditanam untuk menjawab kebutuhan pangan berdasarkan jenis kebutuhan. Dengan menilai dari kebutuhan pangan masyarakat dan kultur tanah yang disesuaikan dengan tumbuhan yang akan ditanam. Tanah Spodosol adalah jenis tanah yang berada di lokasi Food Estate Kalimantan, suatu jenis tanah hasil proses eluviasi yakni akumulasi besi (Fe) dan aluminium (Al) yang larut dan migrasi bahan organik dari lapisan atas ke lapisan yang lebih dalam.

Disparitas jenis pangan dapat mengikuti Jumlah kebutuhan pangan masyarakat Indonesia setiap tahunnya.

Data konsumsi per kapita dari BPS 2023,

1. Padi (Beras): 83 kg/tahun
2. Jagung: 8 kg/tahun
3. singkong: 15 kg/tahun
4. Sagu: 5 kg/tahun
5. Ubi Jalar: 6 kg/tahun
6. Kentang: 3 kg/tahun
7. Gembili: 1 kg/tahun
8. Ganyong: 1 kg/tahun
9. Talas: 1 kg/tahun
10. Sorgum: 0,5 kg/tahun

Total Konsumsi Nasional = Populasi
= 270 juta orang.

Total Konsumsi (Per Tahun):

1. Padi (Beras): $83 \text{ kg} * 270 \text{ juta} = 22,41 \text{ juta ton}$
2. Jagung: $8 \text{ kg} * 270 \text{ juta} = 2,16 \text{ juta ton}$
3. Singkong: $15 \text{ kg} * 270 \text{ juta} = 4,05 \text{ juta ton}$
4. Sagu: $5 \text{ kg} * 270 \text{ juta} = 1,35 \text{ juta ton}$
5. Ubi Jalar: $6 \text{ kg} * 270 \text{ juta} = 1,62 \text{ juta ton}$
6. Kentang: $3 \text{ kg} * 270 \text{ juta} = 0,81 \text{ juta ton}$
7. Gembili: $1 \text{ kg} * 270 \text{ juta} = 0,27 \text{ juta ton}$
8. Ganyong: $1 \text{ kg} * 270 \text{ juta} = 0,27 \text{ juta ton}$
9. Talas: $1 \text{ kg} * 270 \text{ juta} = 0,27 \text{ juta ton}$
10. Sorgum: $0,5 \text{ kg} * 270 \text{ juta} = 0,135 \text{ juta ton}$

Total Konsumsi Semua Pangan:
 $22,41 + 2,16 + 4,05 + 1,35 + 1,62 + 0,81 + 0,27 + 0,27 + 0,27 + 0,135 = 33,345 \text{ juta ton}$.

Persentase Masing-Masing Pangan:

1. Padi (Beras) = $\{22,41/33,345\} * 100\% = 67,2\%$
2. Jagung = $\{2,16/33,345\} * 100\% = 6,5\%$
3. Singkong = $\{4,05/33,345\} * 100\% = 12,1\%$
4. Sagu = $\{1,35/33,345\} * 100\% = 4,0\%$

5. Ubi Jalar = $\{1,62/33,345\} * 100\% = 4,9\%$
6. Kentang = $\{0,81/33,345\} * 100\% = 2,4\%$
7. Gembili = $\{0,27/33,345\} * 100\% = 0,8\%$
8. Ganyong = $\{0,27/33,345\} * 100\% = 0,8\%$
9. Talas = $\{0,27/33,345\} * 100\% = 0,8\%$
10. Sorgum = $\{0,135/33,345\} * 100\% = 0,4\%$

Menyimpulkan distribusi persentase kebutuhan masing-masing pangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Padi (Beras) = 67,2%
2. Jagung = 6,5%
3. Singkong = 12,1%
4. Sagu = 4,0%
5. Ubi Jalar = 4,9%
6. Kentang = 2,4%
7. Gembili = 0,8%
8. Ganyong = 0,8%
9. Talas = 0,8%

Tidak hanya itu.

Perlu diketahui bahwa tanah spodosol adalah jenis tanah yang tidak cocok ditanami tumbuhan seperti Padi, jagung, singkong dll (Zona Hidup). Maka dari itu, menentukan disparitas jenis tanaman dapat diambil dari hasil analisis potensi tanah spodosol. Tanah spodosol memiliki potensi hebat untuk tumbuh buni atau beri, dengan karakteristik tanah yang mendukung, proses berkembang biak dan pertumbuhan beri akan

signifikan. Tentunya, memberikan nilai ekonomi yang baik untuk negara dengan harga, kualitas, serta perputaran tanaman yang singkat akibat modifikasi konsep "right man in the right place" dalam konteks jenis-jenis pangan.

Keunggulan alternatif kebijakan Menambah ragam jenis pangan secara deskriptif berdasarkan perspektif kriteria;

Political Viability: sifatnya lebih mudah dilakukan karena tidak membebankan program food estate yang telah berlangsung, perubahan jenis pangan yang ditanam termasuk ke dalam bentuk teknis dalam program food estate. Hal teknis tersebut tidak terlalu menekankan kepada aspek-aspek politik. Seperti pejabat publik, warga negara yang berpengaruh, kelompok-kelompok kepentingan, serta sumber-sumber kekuasaan lainnya. Aspek hukum, peraturan, dan regulasi menjadi titik sentral dalam upaya menentukan alternatif kebijakan yang dapat diterima sebagai hasil dari proses politik (Patton dan Sawicki, 1986:156-167)

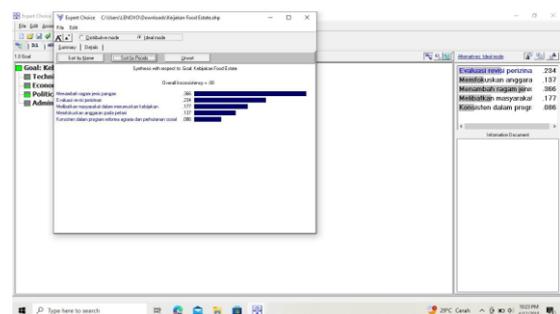
Economic and Finance: alternatif ini mungkin tidak secemerlang alternatif evaluasi revisi perizinan dan alternatif konsisten dalam program reforma agraria dan perhutanan sosial dalam konteks economic and finance, yang dimana masih dibutuhkan pengeluaran dana yang cukup banyak. Berdasarkan Analisis AHP pengeluaran dana yang paling Sepadan jatuh kepada alternatif menambah ragam jenis pangan.

Technical Feasibility: efektivitas dan kecukupan adalah parameter yang digunakan dalam meninjau

menggunakan kriteria Technical Feasibility. Bentuk perubahan bentuk perubahan ragam pangan dapat berupa instruksi berupa keputusan Menteri, dalam konteks Food estate di Kalimantan Tengah maka yang bertanggung jawab Menteri pertahanan yang diberikan mandat langsung oleh Presiden.

Administrative Operability: terdapat 3 kriteria administratif menurut Patton dan Sawicki, yaitu; konteks politik; sosial; dan administratif. Konteks politik dalam program Food estate yang dimaksud penulis berupa tanggung jawab dan wewenang. Sosial adalah para masyarakat lokal dan NGO, serta. Administrative adalah tatalaksana pengerjaan. Menambah ragam ragam memiliki skor yang cukup signifikan dalam analisis dengan metode AHP, sebuah indikasi yang menunjukkan opsi yang memenuhi kriteria Administrative Operability.

SIMPULAN



Gambar 4

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dan analisis menggunakan metode AHM menunjukkan Alternatif Menambah ragam jenis pangan menjadi rekomendasi kebijakan yang paling ideal

untuk dilaksanakan diantara kelima opsi alternatif kebijakan yang diajukan, menilai dari 4 kriteria penilaian Political Viability; Economic and Finance; Technical Feasibility dan Administrative Operability Dengan skor hasil akhir AHP: 0.366.

Disusul dengan hasil AHP Evaluasi dan perizinan (0.234), melibatkan masyarakat dalam merumuskan kebijakan (0.177), memfokuskan anggaran pada petani (0.137), dan konsisten pada program reforma agraria dan perhutanan sosial. Dalam memecahkan problematika program food estate di Kalimantan Tengah.

REFERENSI

- Ensiklopedia Dunia. (n/a). *Spodosol*. Universitas Stekom
- Food and Agriculture Organization (FAO). (2020). Policy Brief: COVID-19 and Food Safety: Guidance for Food Businesses. Rome: FAO. Diperoleh dari: *FAO COVID-19 Guidance*
- Hartono, Dimas Novian. (2021). Food Estate, Menakar Politik Pangan Indonesia Kajian atas Proyek Food Estate Kalimantan Tengah. *Walhi Kalimantan Tengah*.
- Presiden Republik Indonesia. (2020). Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Diperoleh dari: *JDIH Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*
- Saaty, T. L. (1980). The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation. *New York: McGraw-Hill*. ISBN: 978-0070543713
- Untuk Kelapa Sawit. *Warta PPKS*. 15(1), 19-24
- Wiratmoko, D, Dkk. (2007). Mengenal Tanah Spodosol dan Kesesuaiannya Zona Hidup. (2023). Jenis Tanah Spodosol. Basic Methods of Policy Analysis and Planning Front Cover Carl V. Patton, David S. Sawicki Prentice-Hall, 1986 - Political Science - 450 pages
- Jonathan Sarwono. (2010). Pintar Menulis Karya Ilmiah-Kunci Sukses dalam Menulis Ilmiah.(9-12) Andi:Yogyakarta.
- Darmalaksana, W. 2020. Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. (3-5) Darmalaksana: Bandung,